

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Kamis, 29 Agustus 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (Halaman 1)	Kamis, 29 Agustus 2019	Proyeksi Biaya Awal Infrastruktur Rp865 Miliar	Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memproyeksikan biaya awal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dasar ibukota negara di Kalimantan mencapai Rp865 Miliar.
2	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 3)	Kamis, 29 Agustus 2019	Jaringan Transportasi Calon Ibukota Mulai Dibenahi	Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, mengatakan ada peluang pengembangan jalan tol di Kalimantan.
3	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 4)	Kamis, 29 Agustus 2019	Kajian Pemindahan Ibukota Berlangsung hingga 2020	Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan kementeriaannya membutuhkan dana Rp 865 miliar untuk mengawali pembangunan infrastruktur dasar ibukota baru. Namun dana itu belum masuk pagu kebutuhan Kementerian PUPR hingga 2020.
4	Kompas (Halaman 1)	Kamis, 29 Agustus 2019	Badan Otorita Diusulkan	Ibukota negara yang baru akan disiapkan, dibangun dan dikelola oleh badan otorita yang bertanggung jawab kepada Presiden.
5	Kompas (Halaman 1)	Kamis, 29 Agustus 2019	Pemindahan Ibukota: Harapan Bersemi di Sepaku	Dikalangan warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim belum ada yang tahu bahwa di sanalah kompleks pemerintahan negara nantinya akan dibangun.
6	Kompas (Halaman 1)	Kamis, 29 Agustus 2019	Menyiasati Harga Rumah yang Makin Tinggi	Kelompok masyarakat dengan penghasilan tak jauh di atas Rp 7 juta perbulan dihadapkan pada masalah kesulitan membeli hunian.
7	Kompas (Halaman Jendela A)	Kamis, 29 Agustus 2019	Kutai Kartanegara Kondisi Terkini Calon Ibukota	Dengan karakteristik wilayah pegunungan di sisi utara dan pesisir di selatan, Kutai Kartanegara memiliki nilai strategis.
8	Kompas (Halaman 13)	Kamis, 29 Agustus 2019	Berita Foto	Hamparan lahan hutan tanaman industri yang dikelola PT ICI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kaltim.
9	Kompas (Halaman 12)	Kamis, 29 Agustus 2019	Tol Cipali Dibenahi Lagi	Untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, pengelola tol ruas Cikopo-Palimanan memasang beberapa rambu dan pembatas median jalan sepanjang 18 km di 16 lokasi.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Kamis, 29 Agustus 2019	PUPR Ajukan Tambahan 150.000 Unit	Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan 150.000 unit pembiayaan tersebut ke Menteri Keuangan.
11	Bisnis Indonesia (Halaman 8)	Kamis, 29 Agustus 2019	Saatnya Memacu Pariwisata di Bumi Etam	Provinsi Kaltim selama ini memang masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara inklusif dan berkelanjutan.
12	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 29 Agustus 2019	Berita Foto	Menteri BUMN meninjau Tol Kayu Agung di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (27/8).
13	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 29 Agustus 2019	Susur Trans Sumatra: Denyut Ekonomi yang Kian Menggebu	Wajah Shinta sumringan ketika Menteri BUMN mengunjungi tempatnya di Rest Area KM 87 di Jalan Tol Trans Sumatra ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.
14	Bisnis Indonesia (Halaman 2)	Kamis, 29 Agustus 2019	Potensi Disorientasi Pemindahan Ibukota	Polemik paling krusial terkait dengan pemindahan ibukota sebenarnya bukan terletak pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut.
15	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Kamis, 29 Agustus 2019	Konstruksi ke Kertajati Mulai Awal 2020	Operator jalan tol Cikopo-Palimanan, PT Lintas Marga Sedaya memperkirakan konstruksi jalan tol ekstensi ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati bisa dimulai pada Januari 2020.

16	Kompas (Halaman Jendela D)	Kamis, 29 Agustus 2019	"Behind The Scene Pemindahan Ibukota"	Meski Presiden Jokowi sudah menjelaskan alasan pemindahan ibukota negara, tak banyak yang tahu alasan-alasan di balik layar kebijakan tersebut.
----	----------------------------------	---------------------------	---	---

Judul	Proyeksi Biaya Awal Infrastruktur Rp865 Miliar	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 1)		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memproyeksikan biaya awal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dasar ibukota negara di Kalimantan mencapai Rp865 Miliar.		

IBU KOTA BARU

Proyeksi Biaya Awal Infrastruktur Rp865 Miliar

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono memproyeksikan biaya awal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dasar ibu kota negara di Kalimantan mencapai Rp865 miliar.

Secara terperinci, jumlah itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jalan dan jembatan Rp500 miliar, sumber daya air Rp175 miliar, dan permukiman Rp190 miliar.

Kendati demikian, Basuki menyebutkan anggaran itu belum akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

"Angka itu adalah uang muka.

Jadi, masih akan dioptimalisasi, belum perlu ditambahkan sekarang," ujar Basuki di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Paling cepat, imbuhan Basuki, pembangunan fisik infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi bisa dilakukan pertengahan 2020.

Karena itu, ia mengatakan rencana tapak harus sudah rampung pada akhir 2019. Kendati target-target sudah dicanangkan, ia menekankan pemerintah akan menunggu landasan hukum berupa undang-undang tentang ibu kota disahkan DPR.

Meski aturan tersebut tidak bisa rampung tepat waktu, ia menyebut hal itu tidak akan menjadi masalah.

"Ini kan untuk masa depan, 50 sampai 100 tahun ke depan. Jadi, jangan *grusa-grusu*," tuturnya.

Pada bagian lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah tetap akan mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan ibu kota baru kelak.

Kementerian LHK, kata Siti, akan menyiapkan tim untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di wilayah calon ibu kota baru tersebut.

"KLHS kami targetkan bisa diselesaikan dalam jangka waktu dua bulan ini," kata Siti, kemarin.

Pada kesempatan berbeda, pihak

Istana membantah adanya kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Adita Irawati, menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar. Pemilihan ibu kota untuk dipindahkan ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, kata Adita, mengacu pada hasil kajian pemerintah.

"Lokasi itu hasil serangkaian kajian mendalam berbagai aspek yang sudah dilakukan Bappenas dan kementerian lain," kata Adita, kemarin. (Pra/Dhk/Mal/X-6)

Judul	Jaringan Transportasi Calon Ibukota Mulai Dibenahi	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 3)		
Resume	Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, mengatakan ada peluang pengembangan jalan tol di Kalimantan.		

EKONOMI DAN BISNIS

Jaringan Transportasi Calon Ibu Kota Mulai Dibenahi

Bandar udara, rel, dan jalan tol mendukung konektivitas pusat pemerintahan.

EDISI, 29 AGUSTUS 2019

JAKARTA – Badan usaha milik negara di sektor transportasi mulai membenahi jaringan konektivitas di kawasan calon ibu kota baru. PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero), misalnya, menambah kapasitas bandar udara dengan pertimbangan proyeksi kenaikan volume penumpang di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan pemindahan ibu kota bisa mendongkrak penumpang di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggang, Kota Balikpapan, dari 6 juta menjadi 10 juta orang per tahun. "Terminalnya luas dan masih bisa dimaksimalkan," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Senin lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan pusat pemerintahan akan dipindahkan dari Jakarta ke wilayah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Area ini dianggap memiliki kelebihan, seperti minim risiko bencana dan mampu mendorong perekonomian kawasan di sekitarnya, seperti Balikpapan dan Samarinda.

Bandara Sepinggang hanya berjarak 45 kilometer dari lokasi ibu kota baru. Menurut Handy, bandara ini sudah memiliki terminal penumpang seluas 110 ribu meter persegi, hanggar khusus, dan 18 spot parkir pesawat. Bandara ini juga menjadi embarkasi jamaah haji.

Tak hanya membenahi Bandara Sepinggang, Angkasa Pura I juga akan mengambil alih Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda, yang selama ini dikelola Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perhubungan. Dengan skema kerja sama pengelolaan (KSP), kata Handy, pengambilalihan akan berjalan setelah alih kelola Bandara Sentani di Papua selesai. "Bila benar 1,5 juta aparat sipil pindah ke Kalimantan, tentu jadi stimulus untuk mendorong kinerja bandara kami." Presiden Direktur Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, mengatakan akan mengintegrasikan pengelolaan Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dan Bandara Supadio di Pontianak (Kalimantan Barat). "Konsep multi-airport system yang menyelaraskan rute akan sangat membantu pengembangan ibu kota baru," ujar dia.

Angkasa Pura II menganggarkan Rp 480 miliar untuk pembangunan terminal baru di Bandara Tjilik Riwut. Perseroan juga sedang memperpanjang landasan pacu Bandara Supadio hingga 2.600 meter. "Kami mengupayakan lebih banyak penerbangan dari dan ke Kalimantan."

Minim Pemakaian Uang Negara

PEMBIAYAAN melalui skema kemitraan dan investasi swasta menjadi penopang utama pemindahan ibu kota. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi pun tidak dibayai anggaran negara.

Skema Pembiayaan Ibu Kota (Data 21 Agustus 2019)



Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pengembangan transportasi publik berbasis rel cocok untuk ibu kota baru. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Awang Meindra, mengatakan wilayah itu dilintasi dua proyek rel kereta api, yaitu rute Tanjung-Tanah Grogot-Karang Joang di Kota Balikpapan, serta rel lintas Balikpapan-Samarinda. "Ada studi kelayakan dan rancangan dasarnya, tapi saya belum bisa memprediksi kapan konstruksi mulai dibangun," ucap Awang, kemarin.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Sugiyartanto, mengatakan ada peluang pengembangan jalan tol di Kalimantan. Kementerian PUPR mencatat ada potensi pengembangan 1.117,8 kilometer jalan tol di wilayah tersebut, tapi baru satu proyek yang digarap, yakni jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km. "Sudah ada pengajuan pembangunan ruas tol Pontianak-Singkawang," kata dia.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, mengatakan sedang menunggu tender proyek jalan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sepanjang 7,3 kilometer. Proyek itu masih berada dalam tahap pra-kualifikasi hingga akhir 2019. "Kami punya keunggulan sebagai pemrakarsa."

FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS PAE DALE

Judul	Kajian Pemindahan Ibukota Berlangsung hingga 2020	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Koran Tempo (Halaman Ekonomi Bisnis 4)		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan kementeriannya membutuhkan dana Rp 865 miliar untuk mengawali pembangunan infrastruktur dasar ibukota baru. Namun dana itu belum masuk pagu kebutuhan Kementerian PUPR hingga 2020.		

EKONOMI DAN BISNIS

Kajian Pemindahan Ibu Kota Berlangsung hingga 2020

Tender untuk studi kelayakan masih dibuka.

EDISI, 29 AGUSTUS 2019

JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih menggelar berbagai kajian mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Staf Ahli Kepala Bappenas sekaligus Ketua Tim Kajian Pemindahan Ibu Kota, Imron Bulkin, mengatakan kajian perencanaan besar akan rampung paling cepat akhir tahun depan. "Setelah kajian awal, ada penekanan yang lebih teknis dan mendetail," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Merujuk pada kerangka waktu pemindahan ibu kota yang disusun Bappenas, penyusunan kajian dimulai pada 2017. Tahun depan, prosesnya berlanjut ke tahap penyiapan regulasi hingga perencanaan kawasan.

Imron mengatakan lembaganya mengalokasikan dana Rp 24,9 miliar untuk tender paket studi tatanan kota. Tender tersebut dipublikasikan di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang masuk rencana anggaran Bappenas 2019. "Masih banyak studi perencanaan, misalnya soal detail engineering design (DED) serta master plan," ucapnya, tanpa merinci alokasi dana untuk perencanaan lanjutan.

Senin lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan sebuah wilayah di Kalimantan Timur sebagai calon lokasi ibu kota baru. Meski koordinatnya belum dirinci, pusat pemerintahan akan berdiri di wilayah di antara dua kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pemindahan ibu kota diklaim bisa membawa pemerataan ekonomi, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,1-0,2 persen.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soepriyadi Prawiradinata, memastikan pemilihan lokasi dipertimbangkan secara matang. Menurut dia, berdasarkan kajian, terdapat sembilan kriteria penilaian, dari ketersediaan lahan hingga aspek pertahanan. Hasilnya, terdapat tujuh poin yang membuat pilihan negara mengerucut ke Kalimantan Timur. "Kami punya berbagai variabel. Bagaimana dampaknya ke wilayah setempat dan kepada nasional," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan kementeriannya membutuhkan dana Rp 865 miliar untuk mengawali pembangunan infrastruktur dasar ibu kota baru. Namun dana itu belum masuk pagu kebutuhan Kementerian PUPR hingga 2020.

"Itu 'uang muka' yang kami hitung untuk prasarana dasar. Belum ditambah dalam pagu sekarang karena akan dioptimalkan lagi," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, kemarin.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan sedang mengajukan anggaran studi perencanaan infrastruktur dasar. Dana Rp 90 miliar dialokasikan untuk sejumlah studi terkait dengan permukiman, salah satunya ihwal tata bangun lingkungan seluas 40 ribu hektare. "Kami sedang menyiapkan desainnya," ujarnya.

Anggota Komisi Infrastruktur DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti belum adanya alokasi dana ibu kota baru dalam rencana keuangan Kementerian PUPR tahun depan. Padahal, kata dia, nilainya mencapai Rp 120,2 triliun. "Pembangunan kota baru ini jadi seperti wacana saja, harusnya mulai serius," kata dia.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Judul	Badan Otorita Diusulkan	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Ibukota negara yang baru akan disiapkan, dibangun dan dikelola oleh badan otorita yang bertanggung jawab kepada Presiden.		

Badan Otorita Diusulkan

Ibu kota negara yang baru akan disiapkan, dibangun, dan dikelola oleh badan otorita yang bertanggung jawab kepada Presiden. Masukan publik tetap dibutuhkan dalam rencana ini.



Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 kilometer sedang dibangun, Rabu (28/8/2019), dan ditargetkan selesai akhir 2019. Jalan tol ini akan memudahkan akses menuju calon ibu kota RI di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana membentuk badan otorita yang bertugas mempersiapkan, membangun, hingga mengoperasikan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Berbagai hal terkait badan otorita ini akan dituangkan dalam rancangan undang-undang tentang ibu kota negara yang baru.

Pemerintah akan menyerahkan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara kepada DPR pada akhir tahun ini. Dengan demikian, ditargetkan, payung hukum untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta tersebut dapat selesai dibahas pada 2020.

DPR menargetkan, pembahasan regulasi terkait pemindahan ibu kota akan dilakukan setelah DPR periode 2019-2024 dilantik pada Oktober 2019.

Sebelum membahas sejumlah RUU terkait pemindahan ibu kota, DPR akan mengkaji dahulu berbagai aspek terkait pemindahan ibu kota. Guna mendukung hal itu, DPR telah membentuk tim kajian teknis pemindahan ibu kota yang berada di bawah Badan Keahlian Dewan.

Di saat pembahasan regulasi terkait pemindahan ibu kota negara masih dipersiapkan, ta-

nah di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, sudah diincar oleh sejumlah orang dan harganya mulai melonjak naik. Harga tanah di daerah itu, yang sebelumnya Rp 35 juta per hektar, kini menjadi Rp 100 juta per hektar, bahkan lebih.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terjadinya perampasan hak orang lain atau pembuatan data lahan palsu di daerah itu. Namun, sampai saat ini belum ada arahan yang cukup jelas dari pemerintah daerah setempat untuk mengatasi kemungkinan buruk itu.

Kajian Bappenas

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro dalam kunjungan ke

(Sambung ke hlm 15 kol 1-2)

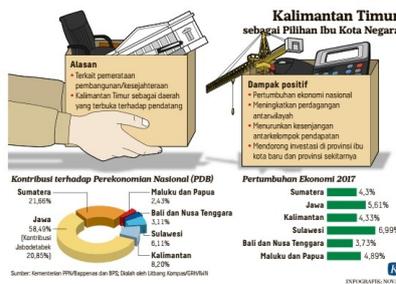
>> BACA JUGA:

Rasa Pancasila

Ibu kota baru hendaknya ramah lingkungan, sosial, dan penuh toleransi.

KOMPAS.ID

klik.kompas.id/rasapancasila



Badan Otorita Diusulkan

(Sambungan dari halaman 1)

kantor harian Kompas di Jakarta, Rabu (28/8/2019), mengatakan, dalam RUU ibu kota negara yang baru akan disebut tentang badan otorita yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Badan otorita ini tak hanya bertanggung jawab dalam persiapan pembangunan hingga pengelolaan ibu kota negara yang baru. Mengacu kajian Bappenas, badan itu juga berwenang mengelola dana investasi pembangunan ibu kota baru dan melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Badan otorita juga berwenang mengelola aset investasi di kawasan ibu kota negara baru dan menyewakan aset tersebut kepada instansi pemerintah dan pihak ketiga.

"Untuk setiap KPBU, penanggung jawab proyek kerja sama dari pemerintah cukup satu saja, yaitu badan otorita," jelas Bambang.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, persiapan pemindahan ibu kota butuh kajian yang matang. "Ini bukan persoalan sederhana memindahkan rumah atau satu-dua properti, melainkan memindahkan seluruh memori kolektif bangsa ini," ujarnya.

Saat ini, kajian teknis dari pemerintah yang diteruskan ke DPR baru dalam bentuk poin-poin singkat dan tidak terperinci. "Kami belum lihat bagaimana peta jalan dari pemerintah karena yang kami terima baru dalam bentuk Power Point sederhana," tutur Fadli.

Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan, masukan dari publik harus didengar agar pemindahan ibu kota negara berhasil dengan baik. "Saya ingin agar cita-cita yang luar biasa ini berhasil, karena ada ibu kota baru Brasil, Brasilia, setelah 50 tahun dicap sebagai ibu kota yang tidak berhasil oleh Harvard University. Saya mengingatkan saja agar kita meren-

canakan jauh lebih matang dan lebih baik. Masukan dari masyarakat juga harus diterima," tuturnya.

Pengamat kebijakan publik bagaimana mencegah terjadinya korupsi dalam pembiayaan pembangunan ibu kota yang baru, yang diperkirakan menelan dana Rp 466 triliun. "Menurut beberapa data, korupsi bisa mencapai 30 persen. Itu bisa menjadi bancakan DPR, pemerintah, dan pengusaha," katanya.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolingki khawatir jika sebagian besar pembiayaan pembangunan ibu kota negara dari pihak luar. "Ini urusan ibu kota negara, justru harus dari APBN yang membiayai," ujarnya.

Arahan

Camat Sepaku, Penajam Paser Utara, Risman Abdul mengimbau kepada pemerintah desa agar tidak memproses jual-beli tanah sampai ada arahan khusus dari gubernur atau bupati. "Sebab, kepala desa sudah banyak ditanya terkait ketersediaan lahan dan harga lahan," kata Risman.

Tanah di Sepaku banyak dicari karena daerah itu diyakini sebagai bakal menjadi pusat ibu kota negara yang baru.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltim Suroto mengatakan, pihaknya belum mengadakan pertemuan untuk mengamankan lahan dan menghindari adanya spekulasi tanah di lokasi yang akan dibangun menjadi ibu kota negara baru. "Nanti hal itu akan kami koordinasikan dengan BPN dan perangkat daerah terkait," katanya.

Menurut Suroto, dirinya baru akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait produk hukum apa yang perlu disiapkan pemerintah daerah.

(LAS/REK/NTA/AGE/DVD/ISW/BRO/CIP)

Judul	Pemindahan Ibukota: Harapan Bersemi di Sepaku	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Dikalangan warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim belum ada yang tahu bahwa di sanalah kompleks pemerintahan negara nantinya akan dibangun.		

PEMINDAHAN IBU KOTA

Harapan Bersemi di Sepaku

Di kalangan warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, belum ada yang tahu bahwa di sanalah kompleks pemerintahan negara nantinya akan dibangun. Meski begitu, harapan baru bersemi.

Begitu pula warga di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang punyanya harapan lebih sejahtera.

Setidaknya, ada perbaikan infrastruktur, seperti jalan. Dua kecamatan itu bersebelahan.

"Saya berharap dengan kepindahan ibu kota ke sini, kehidupan kami lebih baik lagi," ujar Tarno (50), petugas Linmas Desa Suko Mulyo, Sepaku, Rabu (28/8/2019).

Siang itu ia sedang menonton Pertunjukan Seni Tari Tawang Alun di lapangan seberang Kantor Desa Suko

Mulyo di Kilometer 26 Jalan Raya Samboja-Sepaku. Penduduk Sepaku memang sebagian besar transmigran asal Jawa tahun 1975.

Suasana hati Tarno campur aduk. Ada senang, ada cemas. Yang jelas, rencana

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-7)

klik.kompas.id/ibukotabaru

Harapan Bersemi di Sepaku

(Sambungan dari halaman 1)

pemindahan ibu kota jadi topik perbincangan hangat dengan siapa saja ia bertemu.

"Saya yakin kami juga akan kebagian rezeki. Semoga akan merasakan kemajuan, misalnya jalan di sini yang banyak bolong pasti bakal mulus," ujar Tarmudji (53), warga Sepaku.

Di Sepaku, dari satu desa ke desa lain dihubungkan jalan aspal berlubang-lubang. Lampu penerang jalan umum di Jalan Raya Samboja-Sepaku pun sebagian padam. Gelap gulita pada malam hari.

Camat Sepaku Risman Abdul mengungkapkan, luas wilayahnya hampir 117.300 hektar, yang dihuni 36.400 jiwa di 11 desa dan 4 kelurahan. Dari

117.300 hektar itu, 30.000 hektar milik 15.000 keluarga program transmigrasi tahun 1975 dari Jawa.

Di luar 30.000 hektar itu adalah tanah negara, yang antara lain dikelola perusahaan swasta kehutanan dan pertambangan. "Sebelum ada transmigran, wilayah Sepaku hutan belantara. Ada kampung-kampung kecil orang Paser yang berkembang jadi kelurahan atau desa yang berbaaur dengan pendatang," kata Risman.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, komposisi penduduk Kaltim yang beragam menjadi salah satu pertimbangan ibu kota negara dipindahkan ke

daerah itu. Selain Jawa, ada warga Bugis, Banjar, dan Dayak. Akseptabilitas paling baik ada di Kaltim.

Layanan membaik

Pemindahan ibu kota negara diharapkan warga Sepaku mendongkrak layanan dasar, khususnya air dan listrik. Ada warga yang masih tak terlayani jaringan pipa air (PDAM) sehingga mengandalkan sumbor atau tampungan air hujan.

Abdullah, warga Desa Tengin Baru, Sepaku, mengatakan, keluarganya mendapat layanan air PDAM skala kecil yang bersumber dari air Sungai Tengin.

Di Samboja, jika ada perhelatan besar di desa, air pasti mati. "PDAM sering mati, se-

tidaknya sekali seminggu," kata Handoko, warga Desa Mar-go Mulyo.

Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan memacu peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Di Sepaku belum ada layanan kesehatan tingkat rumah sakit. Samboja punya, yakni RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

"Semoga nanti di Sepaku ada rumah sakit dan pusat belanja modern," kata Inggar Efriyanata, warga yang juga Ketua Badan Perwakilan Desa Suko Mulyo.

Namun, bersamaan dengan harapan itu, spekulasi tanah bermunculan. Di Sepaku, misalnya, harga tanah dari Rp 35 juta per hektar kini minimal Rp 100 juta per hektar. Di

Samboja, lonjakan harga tanah juga menggila, dari Rp 1,5 juta per meter persegi menjadi Rp 10 juta per meter persegi.

Camat Samboja Ahmad Nurkhalis dan Camat Sepaku Risman Abdul mengatakan, belum ada laporan pelepasan aset tanah warga besar-besaran. Namun, aparatatur kecamatan, desa, dan kelurahan jadi punya kesibukan baru, yakni melayani permintaan informasi harga tanah dan lokasi paling dekat ibu kota baru.

Kasak-kusuk sudah terjadi, warga jadi melek media dan berita. Lebih dari segalanya, seperti kata Tarno, warga berharap hidup lebih baik, seperti layanan dasar tercukupkan.

(SUCIPTO/
AMBROSIUS HARTO)

Judul	Menyiasati Harga Rumah yang Makin Tinggi	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 1)		
Resume	Kelompok masyarakat dengan penghasilan tak jauh di atas Rp 7 juta per bulan dihadapkan pada masalah kesulitan membeli hunian.		

PERUMAHAN RAKYAT

Menyiasati Harga Rumah yang Makin Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Kelompok masyarakat dengan penghasilan tak jauh di atas Rp 7 juta per bulan dihadapkan pada masalah kesulitan membeli hunian. Kelompok ini sudah tidak boleh memiliki hunian subsidi, tetapi kesulitan mengajukan kredit pemilikan rumah, termasuk sulit mengumpulkan uang muka kredit rumah. Rumah dengan harga terjangkau makin jauh dari pusat kota, yang menimbulkan konsekuensi terhadap biaya transportasi. Adapun harga rumah di tengah kota semakin mahal.

Beberapa pemerintah daerah menyediakan rumah susun bagi masyarakat, baik rumah susun sederhana milik (rusunami) maupun rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Akan tetapi, ada aturan yang harus dipatuhi untuk memiliki hu-

nian subsidi atau menghuni rusunawa.

Pemerintah menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan. Adapun warga yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan bisa membeli rusunami.

Berdasarkan data Bank Indonesia yang dikutip pada Rabu (28/8/2019), harga properti residensial per triwulan II-2019 naik 1,47 persen secara tahunan di 18 kota. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok rumah kecil, yakni 2,18 persen. Adapun harga rumah menengah naik 1,32 persen, sementara harga rumah tipe besar naik 0,92 persen.

Menyiasati situasi ini, pekerja atau keluarga muda ada yang mengontrak rumah atau menyewa apartemen sambil me-

ngumpulkan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR).

Atika Permatasari (27), karyawan swasta, memilih mengontrak rumah di dekat kantornya. Ia dan suaminya sudah lama mengincar rumah di Cinere, Jakarta Selatan, tetapi uang mereka belum mencukupi. "Kami menargetkan dalam tiga tahun ke depan bisa memiliki rumah sendiri," katanya.

Soleh (29), karyawan swasta, mengontrak rumah bersama istri dan satu anak balitanya di Jakarta Barat karena belum sanggup membeli rumah di Jakarta. "Mau mengajukan KPR, banyak syarat yang sulit dipenuhi," ujarnya. Sambil mengontrak rumah, ia mengumpulkan uang agar bisa membeli rumah secara tunai.

Sementara Idris (29), karyawan swasta yang masih lajang,

menyewa satu unit apartemen di Jakarta Pusat. Perantau asal Banyuwangi, Jawa Timur, ini justru membeli rumah di kota kelahirannya untuk persiapan pada masa tua.

"Rumah tapak yang harganya terjangkau hanya di Jonggol atau Cileungsi, Kabupaten Bogor, tetapi waktu habis di jalan," ujarnya.

Kompas melalui akun Instagram @hariankompas melempar pertanyaan "Jika Anda bergaji di atas Rp 7 juta, bagaimana strategi membeli rumah?" Pertanyaan itu dijawab beragam. Ada yang akan membeli rumah di pinggiran kota Jakarta, ada juga yang akan menabung untuk modal bisnis, kemudian

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

BACA JUGA **HLM 17**

Menyiasati Harga Rumah

(Sambungan dari halaman 1)

membeli rumah secara tunai dari hasil bisnis tersebut. Namun, ada juga yang akan menabung pendapatannya lebih dulu, setelah itu membangun rumah sendiri.

Jangka panjang

Secara terpisah, Direktur PT Ciputra Development Tbk Harun Hajadi mengatakan, pengembang telah memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membayar rumah secara bertahap selama 3-5 tahun. Namun, cara ini masih sulit digunakan kelompok masyarakat "tangguh", yang tidak berhak membeli rumah subsidi, tetapi masih sulit membeli rumah secara mencicil. Akibatnya, cicilan bertahap lebih banyak menasar konsumen kelas menengah atas.

Menurut dia, kelompok masyarakat ini bisa dimudahkan melalui kebijakan jangka waktu KPR yang lebih panjang.

Survei harga properti residensial BI menunjukkan 74,32 persen pembeli rumah menggunakan KPR. Adapun 6,64 persen membeli secara tunai dan 19,05 persen membeli rumah secara tunai bertahap. Berdasarkan data BI, KPR dan kredit pemilikan apartemen yang disalurkan perbankan per Juni 2019 sebesar Rp 489,2 triliun.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid menyebutkan, sudah banyak rusun di tengah kota yang bisa dibeli masyarakat kelompok tangguh ini. (LKT/MED/NAD)

Judul	Kutai Kartanegara Kondisi Terkini Calon Ibukota	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman Jendela A)		
Resume	Dengan karakteristik wilayah pegunungan di sisi utara dan pesisir di selatan, Kutai Kartanegara memiliki nilai strategis.		

KUTAI KARTANEGARA, KONDISI TERKINI CALON IBU KOTA



Dengan karakteristik wilayah pegunungan di sisi utara dan pesisir di selatan, Kutai Kartanegara memiliki nilai strategis. Peningkatan aktivitas Kutai Kartanegara sebagai ibu kota baru akan meramalkan dan mendukung perkembangan seluruh kawasan, termasuk Alur Laut Kepulauan di timur Indonesia.

Yoseop Budiarto

Persiapan pemindahan ibu kota negara Indonesia dimulai sejak Tim Nawa Cipta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat analisis kebijakan terkait pemindahan ibu kota pada Maret 2017. Analisis itu kemudian disempurnakan pada Januari 2018. Hasil analisis merekomendasikan sejumlah kabupaten kota yang layak menyandang status ibu kota, antara lain Kutai Kartanegara.

Pada 7 Mei 2019, Presiden Joko Widodo mengunjungi Kalimantan Timur, tepatnya Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang secara administratif menjadi bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun luas keseluruhan daratan 27,26 juta hektar di Kaltim menjadi faktor yang menguntungkan jika ke depan dibutuhkan banyak lahan untuk menunjang aktivitas pemerintah pusat, pemerintahan daerah, ataupun badan usaha milik negara.

Wilayah yang dilalui Sungai Mahakam sepanjang 920 kilometer dan memiliki 16 danau ini juga terhubung dengan salah satu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Adapun ALKI merupakan alur laut yang dilalui kapal atau pesawat asing untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal (Pasal 1 Ayat 8 UU No 6/1996 tentang Perairan Indonesia).

Kutai Kartanegara terhubung pula dengan akses pelayaran dari Laut Sulawesi, melintasi Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok, kemudian ke Samudra Hindia.

Jalur laut-udara
Sudah sejak lama, sektor pertambangan sangat kuat mewarnai perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Mayoritas hasilnya diekspor ke luar negeri. Tahun 2017, tercatat produksi batubara Kutai Kartanegara mencapai 63,98 juta ton atau lebih dari sepertiga total produksi batubara Kaltim 249,47 juta ton.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Kaltim menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar ke-7 di Indonesia pada 2017. Kutai Kartanegara pada tahun yang sama menjadi penyumbang terbesar bagi produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim, yakni 26,20 persen dari total PDRB Kutai Kartanegara 2017.

Pendukung terbesar perolehan PDRB tersebut adalah sektor pertambangan, khususnya batubara, lebih kurang 65,43 persen. Selanjutnya kontribusi diberikan oleh sektor pertanian, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan.

Dapat dikatakan, maraknya kegiatan ekonomi batubara turut membangun kekuatan infrastruktur transportasi di Kutai Kartanegara. Akses jalur darat yang sudah ada terbilang cukup memadai.

Jalan di Kutai Kartanegara, lebih kurang 64 persen, berada dalam kondisi sedang hingga baik. Setidaknya 54,65 persen atau 1.198,38 kilometer jalan di kabupaten ini sudah dilapisi aspal dan beton.

Dampak dari anjaknya ekonomi batubara dinilai turut menyababkan jumlah penduduk miskin Kutai Kartanegara mencapai 56.600 jiwa.

Selain didukung Bandara Sepinggan di Kota Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Turomong Prastoto di Kota Samarinda, Kutai Kartanegara juga didukung jalur transportasi laut dengan lebih kurang 18 pelabuhan di kabupaten itu.

Lokasi Kutai Kartanegara yang terbilang dekat dengan Balikpapan dan Selat Malaka idealnya mampu mendukung keterhubungan perekonomiannya dengan pasar global. Hal ini sekaligus membuka akses ke wilayah timur Indonesia.

Meski demikian, keterhubungan jalur laut dan udara juga berpeluang membawa konsekuensi yang seluk-beluknya diwaspadai. Letak Kutai Kartanegara yang terhubung dengan jalur ALKI II rentan terdampak dinamika sosial-ekonomi ataupun politik dari luar negeri. Analisis yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dikeas Agustus ini memetakan pentingnya mewaspadai ancaman imbas konflik Blok Amalbat di jalur ALKI II.

Sebagai imbas konflik Amalbat, jalur ini, misalnya, rentan digunakan untuk manuver angkatan perang. Adapun dari sisi sosial ekonomi, ALKI II terpelekan sebagai jalur relawan terhadap penyelundupan barang secara ilegal dan perdagangan manusia, khususnya dari luar negeri menuju Pulau Bali.

Sosial-lingkungan
Dari sisi cuaca dan iklim, Kutai Kartanegara termasuk wilayah beriklim tropis dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau dengan suhu serta kelembaban cukup tinggi. Pada saat kemarau, warga Kutai Kartanegara mengalami kesulitan air bersih. Produksi air bersih di Kutai Kartanegara pada 2017 sebanyak 32,26 juta meter kubik, terjual sebanyak 23,11 juta meter kubik.

Pulau	Budaya	Potensi ekonomi	Infrastruktur	Lahan	Lokasi geografis	Bencana alam	Kepadatan
Jawa	Kuat	Kuat	Simp	-	Kurang strategis	Rawan	Tinggi
Sumatera	Terbatas	Besar	Lemah	Luas	Strategis	Rawan	-
Kalimantan	Terbatas	Sangat besar	Lemah	Sangat luas	Strategis	Raman	-
Sulawesi	Terbatas	Relatif besar	Lemah	Relatif luas	Strategis	Rawan	-
Papua	Terbatas	Sangat besar	Lemah	Sangat luas	Kurang strategis	Rawan	-

Profil Calon Lokasi Ibu Kota Indonesia Kab Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

A. Kondisi Geografis
Jarak Jakarta-Tenggarong: 1.300 km

Topografi

- Sebagian besar bergelombang dan berbukit
- Kemiringan lereng bervariasi dari rendah hingga curam
- Daerah datar berada di wilayah pantai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam
- Wilayah perbatasan dan pedalaman topografi pegunungan ketinggian 500-1.000 meter di atas permukaan laut

Luas lahan

- Wilayah darat: 27.263.100 hektar
- Wilayah perairan: 409.700 hektar

B. Infrastruktur (2017)

Jaringan jalan
Panjang jalan: 2.193,02 km

- Jenis permukaan jalan:
 - Beton: **800,81 km**
 - Aspal: 397,57
 - kerikil: 590,64
 - Tanah: 404,01
- Kondisi jalan:
 - Baik: 1.081,55 km
 - Sedang: 128,73
 - Rusak: 430,29
 - Rusak berat: 351,48

Kapasitas produksi dan terjual air bersih itu baru 5-6 persen dari produksi air bersih di DKI Jakarta yang mencapai 504,18 juta meter kubik.

Sebagian penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air minum. Kondisi kondisi ini terjadi di Desa Perian, Kecamatan Murara Mantai, tahun 2017. Warga desa ini merasa menadab kesulitan air minum dan terpaksa bergantung pada air hujan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

Hasil estimasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 menunjukkan, wilayah Kutai Kartanegara baru bisa mengatasi persoalan ketersediaan air bersih lima tahun ke depan.

Kutai Kartanegara juga terimbas reruntuhan banjir dan tanah longsor, serta mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang berlembak. Beberapa contoh kasus bencana alam di Kutai Kartanegara menunjukkan keterkaitan peristiwa tersebut dengan aktivitas penambangan batubara.

Pada 2 Desember 2018, misalnya, tanah longsor terjadi di Kecamatan Sanga-sanga. Sedikitnya lima rumah ambruk dan jalan provinsi rusak akibat bencana itu. Lokasi longsor terjadi sekitar 100 meter dari tempat penambangan batubara.

Kawasan Tuman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kecamatan Sambaja, Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai dijual dengan harga tinggi. Foto diambil Rabu (7/8/2019).

Sumber: Litbang Kominfo, BPS, data lapangan Tim Nawa Cipta 2018, Litbang Kominfo/WPU, data dari Badan Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, BPS, dan Wikipedia, Litbang Kominfo/WPU, data dari BPS Kalimantan Timur



Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 13)		
Resume	Hamparan lahan hutan tanaman industri yang dikelola PT ICI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Kaltim.		

Potensi Lahan Calon Ibu Kota Negara



Hamparan lahan hutan tanaman industri yang dikelola oleh PT ICI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Samboja dan Paser Utara di Kecamatan Sepaku ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon lokasi ibu kota baru. Kemungkinan lahan yang dikelola ini menjadi salah satu alternatif untuk ibu kota baru.

Judul	Tol Cipali Dibenahi Lagi	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman 12)		
Resume	Untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, pengelola tol ruas Cikopo-Palimanan memasang beberapa rambu dan pembatas median jalan sepanjang 18 km di 16 lokasi.		

Tol Cipali Dibenahi Lagi

Untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas, pengelola tol ruas Cikopo-Palimanan memasang beberapa rambu dan pembatas median jalan sepanjang 18 kilometer di 16 lokasi.

INDRAMAYU, KOMPAS — Pengelola ruas Tol Cikopo-Palimanan membenahi infrastruktur jalan untuk meminimalkan kecelakaan. Namun, upaya itu tak cukup tanpa penegakan hukum dan kesadaran pengemudi.

Pembenahan infrastruktur di jalan tol sepanjang 116,7 kilometer itu, antara lain, dilakukan dengan memasang *wire rope* atau pembatas di median jalan, strobo (lampu kedap-kedip), dan *rumble dot* (jalur kejut di bahu jalan). Rabu (28/8/2019), pekerja membangun *wire rope* di median jalan Kilometer (Km) 145-146, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Pembatas berupa tali baja itu akan dipasang di median jalan sepanjang 18 km di 16 lokasi rawan kecelakaan, seperti ruas Km 137 hingga Km 154. Lokasi itu juga berdasarkan rekomendasi polisi. Pemasangan pembatas yang ditargetkan rampung September tahun ini akan melengkapi *wire rope* sebelumnya sepanjang 16 km.

"Nanti kami lihat, apakah pembatas jalan itu akan ditambah atau tidak," ujar Agung Prasetyo, Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola Tol Cipali. Dengan *wire rope*, kecelakaan bermula dari kendaraan menyeberang median jalan bisa dikurangi.

Pihaknya mencatat, pada Januari-Juli 2019, sebanyak 25 orang meninggal dalam kecelakaan yang berawal dari kendaraan menyeberang median jalan di Cipali. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2018, yakni 11 korban meninggal.

"Jalan di Cipali sudah memenuhi standar, seperti median jalan terbuka yang lebih 5 meter tidak diharuskan memasang pembatas jalan. Namun, untuk meningkatkan keselamatan pengendara, kami tetap pasang," kata Agung. Median jalan selebar 9 meter di Cipali berupa



Pekerja berjalan di samping *wire rope* atau pembatas median jalan yang baru dipasang di Kilometer 145 Tol Cikopo-Palimanan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (28/8/2019). Alat itu untuk mencegah kendaraan menyeberang jalan. Sejak Januari hingga Juli tahun ini, 25 nyawa melayang dalam kecelakaan yang berawal dari kendaraan menyeberang median jalan di Cipali.

rerumputan dengan cekungan di tengahnya.

Vincent Poernomo, Managing Director Cakra International, perusahaan pembuat *wire rope*, mengklaim, produknya mampu membendung laju kendaraan dengan kecepatan 100 km per jam dengan sudut 20 derajat. "Empat tali *wire rope* yang kami pasang di Cipali ini mampu menahan beban hingga 80 ton," katanya.

Alat tersebut, lanjutnya, telah terbentang di sejumlah jalan tol, seperti ruas Tol Jakar-

ta-Merak sekitar 60 km. Ia berharap *wire rope* setinggi 680 milimeter dengan ketebalan baja 19 milimeter itu dapat mencegah kendaraan menyeberang yang berujung kecelakaan. "Sebagus apa pun alat *safety* dipasang, kalau pengemudi enggak bisa mengatur kendali, kecelakaan bisa terjadi," ujarnya.

Kelalaian manusia

Data PT LMS, lebih dari 80 persen kecelakaan di Cipali disebabkan faktor kelalaian manusia. Penyebab lain, kenda-

raan, seperti rem blong atau pecah ban. Faktor *human error* itu tampak pada tingginya kasus kecelakaan tabrak belakang.

Hingga pertengahan 2019, dari 61 korban meninggal di Cipali, 34 orang tewas karena tabrak belakang. Kasus serupa mendominasi pada 71 korban meninggal tahun 2018 dan 92 korban tewas tahun 2017.

"Kelalaian manusia juga tampak pada waktu kecelakaan yang paling banyak berlangsung pukul 05.00-06.00. Ini saat pengemudi mengantuk," kata Ge-

neral Manager Operasi PT LMS Suyitno. Adapun titik lelah pengendara berada di ruas Subang-Cikudung dan Cikudung-Kertajati.

Oleh karena itu, pihaknya terus menyosialisasikan pentingnya keselamatan berkendara kepada pengguna Tol Cipali melalui spanduk hingga mendatangi pangkalan bus atau truk. Ia juga mengimbau kepada sekitar 40.000 pengendara yang melintas di Cipali setiap hari agar memanfaatkan area istirahat jika lelah. (IKI)

Judul	PUPR Ajukan Tambahan 150.000 Unit	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Kementerian PUPR telah mengajukan tambahan 150.000 unit pembiayaan tersebut ke Menteri Keuangan.		

PUPR Ajukan Tambahan 150.000 Unit

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan 150.000 unit pembiayaan tersebut ke Menteri Keuangan.

Mutiara Nabila
redaksi@bisnis.com

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heri Djulipurwanto mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta tambahan sampai 150.000 unit, tapi belum mendapat respons Kemenkeu.

"Menurut saya jangan menjanjikan, karena untuk menambah kuota ini harus ada APBN-P [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan]," katanya kepada *Bisnis* usai Rapat Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga PUPR dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (28/8).

Eko juga menyebutkan bahwa FLPP tidak dibahas dalam RAPBN kali ini, melainkan dengan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) bersama DPR Komisi IX. Eko memastikan tahun depan anggaran FLPP akan ditambah dan sudah dimasukkan dalam nota keuangan, tetapi dia belum menyebut jumlah pastinya.

Adapun, tahun ini dari total anggaran 68.000 unit rumah yang bisa dibiayai FLPP, sudah terserap sebanyak 54.000—55.000 unit. Sisa 13.000 unit masih tersebar di sejumlah bank.

"Sisanya masih bisa untuk rumah yang sudah di *pipeline*, sudah *commit* dengan perbankan. Itu tersebar, kan ada 30-an bank, terus SSB [subsidi

► PUPR juga sudah melakukan penggeseran atau realokasi kuota yang tidak terpakai ke bank yang membutuhkan sebanyak 5.000 unit.



Menambah Kuota FLPP

Pemerintah berupaya mengejar target program sejuta rumah yang tahun ini dipatok sebesar 1,25 juta unit. Namun, pengembang, khususnya perumahan bersubsidi mengeluhkan makin menipisnya alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah pun berupaya menambah kuota itu sebesar 150.000 unit dan tinggal menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

Penyaluran FLPP Berdasarkan bank Pelaksana (2015-2019)

Bank Pelaksana	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
BTN	66.563	43.821	0	22.737	26.528	484.379
BTN Syariah	6.220	4.112	0	1.074	2.732	35.260
BRI Syariah	1.449	2.917	5.703	6.842	3.932	26.077
ASBANDA (32 BPD)	782	3.950	10.238	13.988	8.160	38.556
BNI	1.098	1.255	1.456	7.214	7.980	21.948
Artha Graha	191	2.359	5.579	3.885	2.257	14.271
Mandiri	26	16	166	994	1.136	4.969
Bukopin	0	0	0	0	0	1.906
BRI	160	20	603	1.161	1.353	4.030
Mandiri Syariah	0	0	0	0	0	368
Mayora	0	19	18	0	0	37
BANK KEB HANA	0	0	0	31	156	187
BRI AGRO	0	0	0	10	45	55
BTPN	0	0	0	3	0	3
TOTAL	76.489	58.469	23.763	57.939	54.279	632.046

Sumber: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR per 26 Agustus 2019

Bisnis/Petricia Cahya Pratiwi

selisih bunga] kan memang masih ada sisa tapi memang tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Adapun, PUPR juga sudah melakukan penggeseran atau realokasi kuota yang tidak terpakai ke bank yang membutuhkan sebanyak 5.000 unit. "Nanti akhir September akan ada evaluasi lagi," sambungnya.

ANGGARAN PERUMAHAN

Sementara itu, Kementerian PUPR mengajukan anggaran dalam Tahun Anggaran 2020 sebanyak Rp120,2 triliun. Rp8,48 triliun di antaranya untuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Rencana anggaran tersebut lebih tinggi dari tahun ini sebanyak Rp110,73 triliun. Jumlah itu juga sudah mendapat tambahan Rp16,34 triliun untuk pagu indikatifnya. Untuk Ditjen Penyediaan Perumahan, anggarannya juga naik

dari Rp7,82 triliun pada 2019.

"Semua usulan dan saran dari DPR, kami sepakat semaksimal mungkin memprogramkan sesuai dengan tupoksi kewenangan dan tupoksi kita," ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimoljono dalam Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rabu.

Dari Rp8,48 triliun akan dialokasikan ke Ditjen Penyediaan Perumahan dengan alokasi terbanyak untuk rumah swadaya Rp4,34 triliun. "Untuk pembangunan baru 25.365 unit, termasuk pembangunan baru rumah swadaya pariwisata 5.363 unit dan meningkatkan kualitas 156.000 unit rumah."

Kemudian, anggaran untuk membangun rumah susun Rp3,14 triliun atau 4.799 unit, untuk Program Rumah Khusus Rp470 miliar atau 2.000 unit, untuk Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Rp200 miliar, dan dana lainnya Rp310 miliar. □

Judul	Saatnya Memacu Pariwisata di Bumi Etam	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 8)		
Resume	Provinsi Kaltim selama ini memang masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara inklusif dan berkelanjutan.		

► POTENSI EKONOMI BARU

Saatnya Memacu Pariwisata di Bumi Etam

Provinsi Kalimantan Timur selama ini memang masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara inklusif dan berkelanjutan.

Anitana W. Puspa
anitana.puspa@bisnis.com

Sektor pariwisata pun diharapkan bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bumi Etam, sebutan untuk Kalimantan Timur, kendati selama ini terkenal dengan bisnis batu bara.

Dari sektor pariwisata, diharapkan mampu membantu menurunkan defisit neraca transaksi berjalan nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Tutuk Cahyono mengatakan, Kaltim membutuhkan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi lagi untuk keluar dari *middle income trap* (jebakan berpendapatan menengah). Apalagi, karena memiliki ketergantungan terhadap pertambangan dan batu bara, yang rentan terhadap gejolak permintaan eksternal dan sarat akan kondisi ekonomi dan politik negara mitra.

Selama ini, upaya pemerintah untuk mendorong berkembangnya industri bernilai tambah tinggi melalui sektor Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Kaltim mendapatkan tantangan, mulai dari pembebasan lahan masyarakat, tumpang tindih regulasi, ketidakpastian skema investasi, ketidaksiapan dalam pembangunan sarana dan prasarana, hingga anggaran yang tidak memadai.

Pada waktu yang bersamaan, investor menyikapi dengan *wait and see* karena pertimbangan *direct investment* yang cukup besar, tentunya membutuhkan kepastian usaha. Untuk itu, selain sektor

► Sektor pariwisata diharapkan bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bumi Etam, kendati selama ini identik dengan bisnis batu bara.

penghiliran produk pertambangan, lanjut Tutuk, Kaltim perlu memajukan jasa di bidang pariwisata dengan potensi wisata budaya dan hutan alam tropis.

Menurutnya, pariwisata Kaltim berpotensi membesar dan bisa menjadi alternatif sumber pertumbuhan ekonomi di Kaltim jika digarap dengan serius dan bersinergi secara kolaboratif dengan semua pihak yang terkait.

Dia menyebutkan sejumlah kota, seperti Samarinda dan beberapa kota lain memiliki Wisata Susur Sungai Mahakam, Wisata Budaya khas suku Dayak. Di Kota Balikpapan, juga ada konservasi Beruang Madu, Hutan Mangrove, penangkaran buaya Teritip, dan lainnya.

"Untuk memajukan pariwisata di Kaltim memiliki sejumlah tantangan, terutama dari sisi pemenuhan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Mengambil contoh pariwisata utama Kaltim yaitu Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau," jelasnya.

Menurut Tutuk, aksesibilitas utama menuju kepulauan Derawan lewat penerbangan udara masih terbatas dan relatif mahal. Terbatasnya konektivitas penerbangan dari provinsi lain menyebabkan wisatawan harus memilih penerbangan dengan transit yang lebih mahal ketimbang penerbangan langsung.

Di samping penerbangan yang terbatas dan relatif mahal, waktu tempuh lewat laut juga relatif lama. Perjalanan dari Bandara Juwita Tarakan hingga Kepulauan Derawan membutuhkan waktu sekitar 3 jam dengan *speed boat*.

Sementara itu, dari Bandara Kalimarau Berau wisatawan masih harus menempuh sekitar 2 jam perjalanan darat dan dilanjutkan sekitar 30 menit menyeberangi laut untuk sampai di Pulau Derawan.

"Untuk itu, percepatan pembukaan penerbangan komersial yang rutin di

Bandara Maratuserta operasional jalan alternatif dari Tanjung Redeb menuju Tanjung Batu [port penyeberangan ke Kepulauan Derawan] perlu dipikirkan agar pariwisata Kaltim tidak kehilangan momentumnya," tuturnya.

Selain itu, tujuan berwisata bagi sebagian besar turis adalah untuk berlibur sehingga amenitas penunjang berperan penting sebagai faktor penarik *re-visit*. Amenitas di Kawasan Derawan telah diisi oleh beberapa *resort* yang menyediakan fasilitas lengkap, tetapi pilihan restoran dan kafe di luar *resort* masih terbatas.

Sayangnya, harga penginapan relatif lebih mahal dibandingkan dengan tempat pariwisata lainnya seperti di Bali, Lombok, Labuan Bajo, dan Belitung. Harga hotel berbintang tiga di Labuan Bajo berada di rentang Rp600.000, sedangkan di Kepulauan Derawan dengan fasilitas yang mirip, harga kamar di patok sekitar Rp750.000–Rp850.000.

Penetapan harga untuk penyewaan *speedboat* yang belum berstandar serta paket *open trip* yang tidak banyak ditawarkan untuk wisatawan *on the spot* juga perlu menjadi perhatian.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Bumi Etam tidak memiliki persoalan untuk menarik investasi asing.

Namun, yang menjadi catatannya adalah ketertarikan investasi asing tersebut bukan dilandasi oleh iklim investasi yang ramah karena hanya faktor sumber daya alam (SDA).

"Era itu sudah lewat. Kalau Kaltim sekarang ingin menarik investasi yang dijual bukan SDA, tetapi iklim investasi, potensi ekonomi yang jauh lebih kaya dibandingkan sekadar SDA. Sikap ramah investasi menjadi dasar semua kepala daerah. Kepala daerah ramah inovasi dalam kebijakannya mendorong ekonominya lebih cepat," tekannya.

Untuk bisa menciptakan itu membutuhkan birokrasi yang menciptakan reformasi. Esensinya birokrasi menjadi lokomotif pertumbuhan. ■

Judul	Berita Foto	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Menteri BUMN meninjau Tol Kayu Agung di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Selasa (27/8).		

► **PERSIAPAN PERESMIAN TOL**



Antara/Nova Wahyudi

Menteri BUMN Rini Soemarno (*kanan*) meninjau Tol Kayu Agung di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Selasa (27/8). Kunjungan tersebut untuk mengetahui kesiapan peresmian Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2019.

Judul	Susur Trans Sumatra: Denyut Ekonomi yang Kian Menggebu	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Wajah Shinta sumringan ketika Menteri BUMN mengunjungi tempatnya di Rest Area KM 87 di Jalan Tol Trans Sumatra ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.		

► SUSUR TRANS SUMATRA

Denyut Ekonomi yang Kian Menggebu

Agne Yasa
agne.yasa@bisnis.com

Wajah Shinta sumringan ketika Menteri BUMN Rini Soemarno mengunjungi tempatnya di Rest Area KM 87 di Jalan Tol Trans Sumatra ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang dalam kegiatan Susur Tol Trans Sumatra Bakauheni-Palembang pada Selasa (27/8).

Tidak ingin melewatkan kesempatan, Shinta langsung mempromosikan produknya. Ketika itu, Menteri Rini berkesempatan mencoba produk yang dijualnya mulai dari keripik pisang khas Lampung hingga kopi yang diseduh langsung.

Rini pun sempat memuji produk makanan dari salah satu UMKM binaan dari Bank Mandiri itu. Tidak hanya itu, Rini juga membeli produk Keripik Shinta untuk oleh-oleh.

Shinta menjajakan produknya di tempat sementara yang diperuntukkan untuk UMKM. Mengantainya akan ada bangunan *rest area* sebagai fasilitas yang melengkapi Jalan Tol Trans Sumatra di KM 87.

Shinta mengungkapkan produk UMKM miliknya mendapat penawaran untuk bisa memasarkan produknya di beberapa titik *rest area* di Jalan Tol Trans Sumatra yaitu KM 33, KM 87, dan KM 215.

Keripik Shinta yang merupakan asli Bandar Lampung tersebut menyambut baik hal ini sebagai kesempatan untuk mempromosikan produknya, memperluas pasar hingga meningkatkan omzetnya. "Bagus banget prospeknya ke depan di Trans Sumatra. Jadi nanti ke depannya juga kan produk kita makin dikenal," katanya.

Shinta mengklaim omzet usahanya bisa mencapai Rp200 juta per bulan. Harganya Rp15.000 hingga Rp50.000 untuk keripik. Pemasarannya dilakukan lewat toko yang berlokasi di jalan Pagar Alam, Bandar Lampung, yang juga ramai, yang kemudian juga ditawarkan secara daring.

Dia mengatakan keberadaan Trans Sumatra tidak hanya menyediakan akses jalan yang lebih lancar bagi masyarakat tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan bagi pengunjung untuk produk khas daerah. Shinta

berharap *rest area* di Jalan Tol Trans-Sumatra dapat menjadi pusat belanja atau *one stop shopping*.

"Harapannya UMKM lebih maju lagi, khususnya oleh-oleh Lampung jadi tidak perlu nyari jauh-jauh, Lampung ini kan luas. Jadi [*rest area* Jalan Tol Trans Sumatra] satu tempat kan udah jadi *one stop shopping* aja gitu. Harapannya omzet bisa naik dua kali lipat," jelasnya.

Kini, dengan peluang pemasaran di *rest area*, Shinta juga mulai menyiapkan produknya agar bisa lebih menarik lagi. Saat ini dia berencana akan memperbaiki kemasan produk.

"Produknya udah enak tetapi didukung lagi dengan kemasan yang lebih bagus. [Untuk persiapan menjual di *rest area* jalan tol] Produksinya pasti akan ditingkatkan. Kita kan biasanya memakai tiga desa, jadi nanti bisa tambah mungkin 5-6 desa untuk pemasok bahan baku pisang," ujarnya.

Keripik Shinta tidak sendiri, masih banyak pelaku usaha UMKM lainnya yang menantikan dan berharap banyak dari keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra ini. Mengantainya UMKM juga jadi fokus pemerintah.

Di sepanjang ruas Jalan Tol Trans Sumatra, BUMN-BUMN Karya seperti Hutama Karya, Waskita Karya dan Adhi Karya telah menyiapkan sebanyak 12 tempat istirahat dan pelayanan (*rest area*) sesuai kebutuhan pengguna jalan tol.

Setiap tempat istirahat dilengkapi dengan fasilitas berupa mushala, toilet, tempat pengisian BBM berupa SPBU Modular atau kiosk atau motoris, warung makanan dan minuman serta mobile ATM di beberapa titik.

Menteri BUMN juga mendorong UKM-UKM binaan BUMN dapat berjualan di *rest area* Jalan Tol Trans Sumatra.

Adapun, untuk penyelesaian area peristirahatan, Rini mengakui memang membutuhkan waktu lebih lama karena pembebasan lahan dari *rest area* sedikit terlambat dibandingkan dengan jalur jalan tolnya.

"Jadi *rest area* kita harapkan di titik-titik ini selesai bulan Desember. Jadi seperti sekarang, *rest area* ini mungkin untuk makanan. Memang

kita sediakan untuk UMKM-UMKM dari daerah setempat itu di beberapa titik mungkin sudah bisa," katanya.

Selain membuka peluang untuk meningkatkan ekonomi pelaku UMKM lokal. Pengoperasian jalan Tol Trans Sumatra juga diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan.

Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan Tol Trans Sumatra Bakauheni - Kayu Agung yang dikelola perseroan, kini ditempuh selama 6 jam dengan total jarak tempuh 325 km. Sebelum ada tol ini, jarak tempuh tercatat 10-11 jam.

SEGERA DIRESMIKAN

Bintang mengatakan bahwa pihaknya berharap ruas tol Trans Sumatra hingga Palembang ini dapat cepat diresmikan dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat.

"[Agar] bisa dipergunakan oleh masyarakat Sumatra Selatan dan sekitarnya, sehingga angkutan logistik dari satu tempat ke tempat lain ini bisa lebih cepat, murah, dan bisa dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga perekonomian Indonesia melalui Trans Sumatra ini akan menjadi lebih baik," jelasnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno pun memastikan tol Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 85 km akan beroperasi, sehingga nantinya bakal tersambung dari Bakauheni-Kayu Agung sepanjang 325 km.

"Saya mendorong HK [Hutama Karya] dan Waskita supaya ini nantinya bisa segera beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.

Dia menjelaskan untuk ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sudah diuji dan siap untuk dioperasikan. Pihaknya juga masih menunggu penyelesaian untuk ruas tol Pematang Panggang-Kayu Agung. "Jadi Insya Allah kita targetkan akhir September bisa selesai semua sampai ke Palembang.

Tol Trans Sumatra, mulai ruas Bakauheni-Palembang memiliki panjang 365 kilometer. Adapun ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung memiliki panjang 185 km.

Judul	Potensi Disorientasi Pemindahan Ibukota	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 2)		
Resume	Polemik paling krusial terkait dengan pemindahan ibukota sebenarnya bukan terletak pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut.		

Potensi Disorientasi Pemindahan Ibukota

Polemik paling krusial terkait dengan pemindahan ibukota sebenarnya bukan terletak pada setuju atau tidak setuju terhadap rencana tersebut. Wacana kebutuhan pemindahan ibukota memang memiliki rasionalitas yang memadai. Selain menjadi ibukota, Jakarta memang telah menjadi sentral seluruh kegiatan, mulai politik, pemerintahan, budaya, apalagi ekonomi.

Kesempurnaan fasilitas yang dimiliki Jakarta, menjadi daya tarik luar biasa. Dampaknya adalah kompleksitas beban, mulai dari persoalan kemacetan, banjir dan persoalan sosial akibat derasnya urbanisasi. Berbagai persoalan ini harus segera dicarikan solusinya.

Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, bisa jadi dapat mengurangi salah satu beban Jakarta. Namun, urgensi pemindahan ibukota tentu tidak hanya menyelesaikan persoalan Jakarta. Pasalnya, jika yang harus diselesaikan hanya persoalan Jakarta, tentu solusi yang lebih efisien tidak mesti pindah di luar Pulau Jawa. Mungkin cukup hanya bergeser ke wilayah sekitar Jakarta, seperti era Presiden Soeharto menyiapkan Jonggol sebagai alternatif ibukota baru.

Seperti disampaikan Presiden Jokowi, tujuan pemindahan ibukota tidak hanya menyelesaikan persoalan Jakarta atau beban Pulau Jawa tetapi untuk mewujudkan visi pembangunan Indonesia sentris. Artinya, pemerataan pembangunan tanpa kesenjangan yang kian melebar antarpulau dalam bingkai NKRI dan menggeser

dominasi kue pembangunan di Pulau Jawa yang mencapai 58%, sementara Sumatra 22%, Sulawesi-Papua 9%, Kalimantan 8% serta Bali dan Nusa Tenggara 3%.

Perpindahan ibukota mungkin mendorong pergeseran pergerakan kegiatan ekonomi ke Kalimantan Timur. Pada prinsipnya terdapat adagium ilmu ekonomi di mana *supply create demand*. Status sebagai ibukota baru memang lebih dari cukup sebagai instrumen daya tarik ekonomi (*growth pool*).

Namun, hal itu harus dicukupi dengan daya dukung wilayah Kalimantan Timur agar mampu menampung dan merealisasikan minat dan potensi investasi.

Utamanya daya dukung terhadap investasi sehingga mampu melakukan penghiliran industri. Hanya melalui pengolahan berbagai potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, nilai tambah dan peningkatan produktivitas dinikmati masyarakat Kalimantan Timur, serta meluas ke provinsi sekitarnya, bahkan Indonesia bagian timur.

Ketersediaan infrastruktur energi, sistem logistik, dan kawasan industri yang efisien menjadi syarat mutlak. Termasuk juga kesiapan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) setempat. Pasalnya,

kesenjangan hanya bisa terkikis jika terjadi peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Masalahnya, tanpa dukungan energi yang efisien, penghiliran berbagai potensi komoditas tambang dan berbagai hasil hutan, hal itu hanya ilusi. Infrastruktur logistik diperlukan sebagai mediasi konektivitas kegiatan ekonomi (kawasan industri) agar terintegrasi dengan jalur rantai pasok.

Efisiensi konektivitas dan rantai pasok inilah yang dengan sendirinya akan memancing dan menjadi daya tarik investasi.

Tanpa kesiapan daya dukung dan daya tampung investasi, niscaya pemindahan ibukota justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Pasalnya,

berbagai perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara hanya akan memfasilitasi percepatan eksploitasi sumber daya. Investasi besar masuk tetapi hanya di sektor ekstraktif, dan memanfaatkan peningkatan kapasitas pelabuhan. Ditambah lagi dengan kemudahan proses perizinan, karena lokasi investasi semakin dekat dengan ibukota.

Tanpa peningkatan kualitas SDM di sekitar ibukota baru, manfaat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur justru lebih banyak dinikmati pendatang.

Pemerintah telah menargetkan perpindahan ibukota sudah

terrealisasi pada 2024. Bappenas menaksir pembiayaan pemindahan ibu kota hanya mencapai Rp485 triliun. Dari kalkulasi waktu dan kebutuhan dana tersebut, artinya Bappenas hanya menerjemahkan perpindahan ibukota sekadar memindahkan kantor pemerintahan.

Pembiayaan itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya pemerintah sendiri, mulai kebutuhan ketersediaan lahan untuk lokasi perkantoran dan proses pembangunan perkantoran baru. Tiak ada perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang komprehensif untuk mendukung kesiapan Kalimantan Timur dalam menggeser kegiatan ekonomi.

Jika salah prioritas dalam perencanaan pembangunan, hal ini justru akan berpotensi menyebabkan disorientasi. Seperti halnya pembangunan Bandara Kertajati yang masih sepi penumpang. Mestinya sebagai tahap awal, hal paling utama adalah justru membangun konektivitas daerah sekitar agar terhubung dengan Kertajati.

Ilustrasi yang sama akan terjadi pada pembangunan ibukota baru. Bahkan, risiko negatifnya justru lebih besar. *Pertama*, penerima manfaat dari pembangunan tak optimal memberikan nilai tambah perekonomian daerah. *Kedua*, memicu terjadinya ekonomi biaya tinggi. *Pasalnya*, konsentrasi kegiatan ekonomi tetap di Jawa, sementara proses perizinan berpindah ke Kalimantan. *Ketiga*, berpotensi memperlebar defisit neraca perdagangan. Percepatan kebutuhan pembangunan infrastruktur tentu akan memicu kebutuhan impor sebagaimana terjadi pada 2017—2019.



ENNY SRI HARTATI
Direktur Eksekutif Indef

Judul	Konstruksi ke Kertajati Mulai Awal 2020	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Operator jalan tol Cikopo-Palimanan, PT Lintas Marga Sedaya memperkirakan konstruksi jalan tol ekstensi ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati bisa dimulai pada Januari 2020.		

► TOL CIKOPO-PALIMANAN

Konstruksi ke Kertajati Mulai Awal 2020

Bisnis, CIREBON — Operator jalan tol Cikopo—Palimanan, PT Lintas Marga Sedaya (LMS) memperkirakan konstruksi jalan tol ekstensi ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka bisa dimulai pada Januari 2020. Kompensasi kepada perseroan atas pembangunan jalan tol perpanjangan itu belum diputuskan.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Direktur Operasi LMS Agung Prasetyo mengatakan bahwa pelaksanaan konstruksi akan bergantung pada progres pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia menyebut, konstruksi jalan tol ekstensi dengan total panjang 6 kilometer itu bisa dimulai jika pembebasan lahan rampung pada akhir 2019.

"Harapannya pembebasan lahan oleh Pemprov Jabar itu selesai di akhir tahun ini. Maka, kita akan mulai membangun di Januari 2020," jelasnya menjawab pertanyaan *Bisnis* di Cirebon, Rabu (28/8).

Agung menurutkan, perpanjangan jalan tol BIJB merupakan permintaan dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). Oleh karena itu, pembangunan jalan tol ekstensi akan menjadi penambahan ruang lingkup dari jalan tol Cikopo—Palimanan. Sebagaimana diketahui, badan usaha jalan tol akan mendapat kompensasi jika terdapat penambahan ruang lingkup, antara lain penam-

► **Konstruksi jalan tol ekstensi dengan total panjang 6 kilometer itu bisa dimulai jika pembebasan lahan rampung pada akhir 2019.**

bahan durasi konsesi dan peningkatan tarif dasar per kilometer. Agung menyebut, kepastian bentuk kompensasi baru akan diputuskan setelah proyek perpanjangan jalan tol ini rampung.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama LMS, Firdaus Azis menyatakan perseroan sudah mendapat komitmen pendanaan untuk pembangunan jalan tol ekstensi ke BIJB. Biaya pembangunan jalan tol ekstensi ini ditaksir kurang dari Rp1 triliun.

Dalam catatan *Bisnis*, perpanjangan jalan tol ke BIJB bakal menambah akses ke bandara dengan kapasitas 5 juta penumpang per tahun tersebut. Akses utama menuju BIJB dari Bandung adalah jalan tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan. Jalan tol sepanjang 61 kilometer itu belum rampung.

Pembangunan akses dan bandara yang tidak selaras telah membuat BIJB sepi penumpang selama 1 tahun beroperasi. Kementerian Perhubungan akhirnya mengalihkan penerbangan domestik dengan pesawat jet dari Bandara Husein Sastranegara Bandung ke BIJB per 1 Juli 2019 lalu.

Di sisi lain, LMS juga sudah mengajukan kenaikan tarif tol kepada Kementerian PUPR. Agung mengatakan perseroan terakhir kali menyesuaikan tarif tol pada Oktober 2017. Saat itu, kenaikan tarif mencapai 6,4%.



Bisnis/Rachman

"Penyesuaian tarif sesuai dengan besaran inflasi," ujarnya.

Dia menurutkan, pihaknya akan menunggu keputusan pemerintah terkait dengan usulan kenaikan tarif. Jalan tol Cipali bukan satu-satunya ruas tol yang dimungkinkan mengajukan kenaikan tarif. *Bisnis* mencatat, sedikitnya ada 14 ruas lain bisa mengajukan kenaikan tarif tahun ini.

Untuk diketahui, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPTJ) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.115/2005 tentang Jalan Tol.

Agung Prasetyo juga mengatakan LMS menargetkan pemasangan tali baja atau *wire rope* sepanjang 18 kilometer rampung pada September-Oktober 2019. Tali ini berfungsi sebagai pemisah pada median jalan sehingga bisa mengantisipasi kendaraan melintas ke lajur berlawanan.

Median pada jalan tol Cikopo—Palimanan, katanya, tergolong median terbuka dengan lebar lima meter. Dia menambahkan, pemasangan tali baja akan menambah fitur keselamatan di jalan tol sepanjang 116,75 kilometer tersebut.

"Sebagai pembatas, ini akan mengurangi *fatality*. Selain itu, kami juga terus mengimbau pengendara untuk tidak melebihi batas kecepatan," jelasnya.

PINDAH TRASE

Sementara itu, PT Hutama Karya (Persero) belum memastikan adanya pemindahan trase ruas tol Palembang-Tanjung Api Api karena masih dalam pembahasan bersama sejumlah pihak terkait.

Pemindahan trase ini menjadi opsi karena Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memutuskan untuk mengubah area pada KEK Tanjung Api Api ke kawasan yang lebih dekat dengan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat. Ke-

dua kawasan masih berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Sumatra Selatan. Dilansir dari laman Dewan KEK, perubahan area akan dituangkan dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 51/2014.

Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo mengatakan bahwa pihaknya belum tahu pasti apakah trase bakal dipindahkan, tetapi yang pasti pembangunan jalan tol Palembang-Tanjung Api Api ini akan tetap digarap.

"Belum tahu trase ini apakah dipindah atau tidak karena masih dalam pembahasan dengan Bappenas dan Menko, kita belum tahu pasti. Semula memang ada Tanjung Api Api itu bagian dari ruas tol Jalan Trans Sumatra tetapi mulai kapan mau dibangunnya belum ada kepastian dari kita dengan PU," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (26/8).

Untuk diketahui, proyek jalan tol Palembang-Tanjung Api Api merupakan salah satu proyek

strategis nasional (PSN) dan ruas prioritas yang ditugaskan kepada Hutama Karya. Penugasan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014.

Bintang juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan desain Jalan Tol Tanjung Api-Api (TAA).

Bahkan, pekerjaan pembuatan desain ini telah dilakukan perusahaan sejak 2017. Jalan tol ini akan menjadi akses utama ke KEK Tanjung Api Api yang digadang-gadang menjadi kawasan industri pengolahan karet dan sawit.

Project Manager Hutama Karya Hasan Turahyo menyatakan pihaknya sudah menyiapkan desain jalan tol dan studi pendukung pada ruas Palembang-Tanjung Api Api. Namun, tahap konstruksi tidak serta merta bisa dimulai karena Hutama Karya masih menunggu kesetujuan KEK. (Kriszta Putri K)

Judul	"Behind The Scene Pemindahan Ibukota"	Tanggal	Kamis, 29 Agustus 2019
Media	Kompas (Halaman Jendela D)		
Resume	Meski Presiden Jokowi sudah menjelaskan alasan pemindahan ibukota negara, tak banyak yang tahu alasan-alasan di balik layar kebijakan tersebut.		

"BEHIND THE SCENE" PEMINDAHAN IBU KOTA



Perbaiki Jalan Raya
Samoja-Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang rusak, Rabu (28/8/2019). Di sekitar kawasan ini, menurut rencana, akan dibangun ibu kota negara RI.

Meski Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan alasan pemindahan ibu kota negara, tak banyak yang tahu alasan-alasan di balik layar kebijakan tersebut. Rencana pemindahan ibu kota masih menyisakan tanya.

KHAERUDIN

Mengapa, misalnya, Presiden Joko Widodo tak pernah mengumumkan kebijakan pemindahan ibu kota dalam kampanye Pemilihan Presiden 2019. Kalaulah Presiden selalu menekankan kebijakan pembangunan di masa pemerintahannya tak lagi Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris, mengapa ia tak pernah mengungkapkan salah satu langkahnya adalah memindahkan pusat pemerintahan.

Pertanyaan publik terus me-

ngemuka. Misalnya, mengapa jika kajian tentang pemindahan ibu kota telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, publik tak pernah tahu detail alasan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menjawab pertanyaan tentang apa saja yang berada di belakang layar dalam kebijakan pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kaltim, Menteri Perencanaan Pembangunan Na-

sional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rabu (28/8/2019) siang, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas di sela rapat kerja dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan. Bambang secara khusus menjawab pertanyaan di belakang layar pemindahan ibu kota.

Dia menjawab *blab-blakan* semua pertanyaan yang dilontarkan wartawan dan peneliti Litbang Kompas.

Pertanyaan dijawab dengan menampilkan penjelasan lewat beberapa lembar presentasi Power Point. Sebagian isi presentasi Bambang tak bisa dikutip untuk menghindari me-

reka yang hendak mencari untung dari kebijakan pemindahan ibu kota ini.

"Yang pasti, kalau Presiden mengumumkan, ya, tidak detail. Presiden bukan menteri atau konsultan yang penjelasannya bersifat teknis. Beliau menjawab pertanyaan berdasarkan tiga pertanyaan yang paling sering muncul," ujar Bambang mengawali pembicaraan.

Kajian lengkap

Menurut Bambang, dari sisi Bappenas, kajian soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim sebenarnya cukup lengkap, baik dari aspek lingkungan hidup maupun sosial budaya. Dari sisi lingkungan hidup, menurut Bambang, ketika pemerintah akhirnya memutuskan ibu kota dipindah ke Kaltim, Presiden Jokowi tak mau di area konservasi.

"Dari aspek lingkungan hidup, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto itu hutan konservasi. Hutananya sebagian rusak. Presiden malah meminta hutan konservasi direhabilitasi dulu," tutur Bambang.

Ketika akhirnya diputuskan ibu kota baru di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, menurut Bambang, dari aspek lingkungan hidup sudah memenuhi persya-

ran. "Lingkungan, ya kualitas udara, air, sudah jelas. Daerah tersebut jauh dari lokasi tambang atau bekas tambang," kata Bambang.

Pilihan merehabilitasi Tahura Bukit Soeharto karena meskipun telah menjadi kawasan konservasi, sebagian area justru dirusak pertambangan batubara ilegal. Bambang mengaku memasukkan kawasan Tahura Bukit Soeharto agar bisa direhabilitasi menyempang ibu kota dipindah di dekat area konservasi tersebut. "Nanti di wilayah Kutai Kartanegara yang menjadi ibu kota akan lebih banyak dipakai sebagai ruang terbuka hijau," ujarnya.

Selain aspek lingkungan, Bambang juga mengatakan, pemerintah telah mengkaji aspek sosial budaya. Dari aspek sosial budaya inilah, salah satu pertimbangan pemerintah memutuskan ibu kota baru akan dibangun di Kalimantan Timur.

Pertimbangan di balik layar Kaltim sebagai ibu kota baru adalah penerimaan warga setempat terhadap pendatang. Penduduk di Kaltim dinilai lebih mudah menerima kehadiran pendatang "Kami melihat tingkat akseptabilitas yang paling tinggi terhadap pendatang, ya, Kaltim," ujarnya.

Kembali ke ibu kota

Dalam mempertimbangkan aspek sosial budaya penentuan lokasi ibu kota baru ini, pemerintah melibatkan antropolog dan budayawan. Diskusi kelompok terarah dilakukan berkali-kali. Pelibatan budayawan diakui Bambang juga terkait dengan faktor kesejahteraan.

"Kami diminta jangan menyebut pindah ibu kota, tetapi kembali ke ibu kota karena kerajinan pertama (di Indonesia) adalah Kutai. Rupanya *mblab*-nya kerajinan lama di Indonesia yang kemudian turun sampai Mataram. Intinya, ini kerajinan pertama, peradaban pertama (Indonesia), makanya budayawan bilang, kembali ke ibu kota," tutur Bambang.

Lantas, jika diskusi hingga kajiannya sudah dilakukan tiga tahun terakhir, mengapa Presiden Jokowi bahkan tak pernah menyinggung pemindahan ibu kota sama sekali dalam kampanye pilpres lalu? "Presiden tidak mau (kebijakan pemindahan ibu kota) jadi permainan politik," katanya.

Hasil kajian tiga tahun terakhir tentang pemindahan ibu kota pun tak bisa sembarangan diakses demi menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang ingin mengeruk untung di balik kebijakan ini, termasuk spekulasi.

Kota hutan

Saat ditanya, apakah ada pengusaha yang tahu lokasi baru ibu kota RI karena setelah Presiden mengumumkannya, ada pengembangan properti yang mengiklankan produk properti dekat lokasi baru ibu kota di harian Kompas.

Bambang menjawab tegas bahwa tak ada satu pengusaha pun yang tahu lokasi baru ibu kota RI. "Kan, itu (iklan properti di Kompas) di Balikpapan. Itu sama saja ketika MRT baru selesai, di Lebak Bulus, ada iklan apartemen atau rumah ini siap di dekat MRT. Iklannya, kan, baru muncul setelah pengumuman, ada momen ini ibu kota baru," ujar Bambang.

Seperti apa ibu kota baru nanti? Konsepnya kota dalam hutan. "Bukan hutan kota. Jadi, salah satunya bagaimana menerjemahkan ruang terbuka hijau dalam bentuk hutan, pepohonan dalam kota. Bangunannya pun harus *green design*, baik dari sisi energi maupun tanaman yang akan dibiarkan tumbuh," ucap Bambang.

Satu hal lagi, pemerintah tidak mendorong rumah tapak di ibu kota baru nanti. Pemerintah akan membangun apartemen atau *town house* yang bisa dipakai pegawai negeri sipil yang pindah ke ibu kota baru.

Jadi, sudah siap pindah ke ibu kota baru di dalam hutan?